

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 dan disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik memuat kebijakan pembangunan, sasaran, uraian program dan kegiatan serta prioritas pembangunan. Spektrum pembiayaan sebagai alat untuk mengimplementasikan pelaksanaan program meliputi pendanaannya yang terkait dengan APBD Kabupaten Gresik APBD Propinsi dan APBN maupun dari investasi masyarakat serta swasta.

Proses penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2017 didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD sebagaimana diamanatkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu secara kontekstual dalam mekanisme perencanaan, secara substantif Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2017 mengintegrasikan program-program pemerintah pusat sebagaimana amanat Peraturan Presiden tentang RKP, program Kabupaten Gresik maupun program-program hasil penjaringan aspirasi

yang telah diformulasikan melalui Forum SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik maupun Musrenbang RKPD.

Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2017 yang memuat prioritas pembangunan, kerangka ekonomi dan secara rinci dijabarkan dalam agenda dan sub agenda pembangunan disusun dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam memanifestasikan kegiatan pembangunan di Gresik.

Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik berkewajiban menyusun rencana program dan kegiatan APBD. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBD, swasta, donator masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2017, menjadi acuan dalam penyusunan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas (AKU-SP) APBD Kabupaten Gresik tahun 2017.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2017, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
15. Peraturan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 102 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2011 – 2015.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik 2017 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD 2017. Hal ini sebagaimana secara yuridis diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Tujuan

Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2017 ini nantinya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD dan penyusunan RAPBD, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
5. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
8. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun Perencanaan ini menggunakan Pendekatan Normatif dan deskriptif serta forum SKPD dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV : PENUTUP

Lampiran Matrik Kebijakan dan Program Tahun 2017